



## I. DESKRIPSI PROGRAM

### A. PROGRAM TITLE

Mendorong Inisiatif Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat yang Berkeadilan dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

### B. BACKGROUND

Telah cukup lama, para pakar memperingatkan kemungkinan terjadinya perubahan iklim (climate change) di bumi ini. Perbincangan perubahan iklim pun semakin marak semenjak Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro - Brazil yang menghasilkan konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk perubahan iklim - United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Konvensi ini berlaku sejak 21 Maret 1994 setelah diratifikasi 50 negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 1997, Pertemuan Para Pihak (Conference of The Parties - COP) 3 di Kyoto - Jepang menyepakati sebuah tata cara penurunan emisi gas rumah kaca, yang kemudian dikenal dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto menargetkan dan menjadwalkan penurunan emisi yang harus dilakukan negara Annex-1 (yang terdiri dari negara industri serta negara dengan ekonomi dalam transisi), yaitu sebesar 5,2% dari tingkat emisi bersama mereka di tahun 1990. Target ini harus dicapai dalam Periode Komitmen Pertama yaitu 2008-2012. Melalui COP 13 di Bali - Indonesia (2007), UNFCCC melahirkan Bali Road Map yang merupakan kesepakatan aksi adaptasi, jalan pengurangan emisi gas rumah kaca, transfer teknologi dan keuangan yang meliputi adaptasi dan mitigasi.

Dampak perubahan iklim memang semakin hari semakin nyata dirasakan. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan kenaikan temperatur global sebesar 0,76 °C antara tahun 1850 sampai 2005. Sepanjang abad ke 20, Benua Asia mencatat rekor kenaikan tertinggi, yakni 1 °C (IPCC WGI 2007). Karena emisi akan tetap berada di atmosfer dalam waktu lama, IPCC memprediksikan pemanasan 10 tahunan sebesar 0,2 °C hingga 2030, yang mengindikasikan kenaikan suhu rata-rata 0.6 °C. Selain udara yang terasa semakin panas, berbagai bencana yang rutin pun telah terjadi, seperti banjir (Indonesia dan Malaysia), badai (Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik), dan gelombang panas (India, Bangladesh, AS, Eropa, dan Afrika). Kegagalan usaha-usaha sektor pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan) yang mulai terjadi akan mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan global. Berbagai penyakit baru pun mulai bermunculan. Kerusakan ekosistem akan mempertinggi biaya pengelolaan sumber air, pesisir, dan kawasan konservasi lainnya. Pada gilirannya, pembangunan sosial dan ekonomi akan terganggu, terlebih pada negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi stagnan.

Dalam kaitan dengan perubahan iklim, sektor kehutanan memiliki 2 (dua) posisi yang saling berseberangan. Pertama, sektor kehutanan dianggap sebagai salah satu penyumbang emisi yang cukup signifikan mencapai 18%-20% total emisi

gas rumah kaca<sup>1</sup> (GRK) di atmosfer sebagai dampak penebangan, konversi lahan, kebakaran hutan, dan aktivitas lainnya. Kedua, sektor kehutanan juga bisa berperan strategis dalam pengurangan emisi GRK melalui penyimpanan karbon (carbon storage) dan sequestrasi karbon (carbon sequestration), baik yang berasal dari stok sumberdaya hutan (SDH) yang ada, maupun upaya-upaya rehabilitasi lahan dan penghutanan kembali (reforestation).

Hutan dalam konteks perubahan iklim dapat berperan sebagai sink (penyerap/penyimpan carbon) maupun source (pengemisi carbon). Deforestasi dan degradasi meningkatkan source, sedangkan aforestasi, reforestasi dan kegiatan pertanaman lainnya meningkatkan sink.

Emisi Gas Rumah Kaca yang terjadi di sektor Kehutanan Indonesia bersumber dari deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan akibat illegal logging, kebakaran, over cutting, perladangan berpindah (slash and burn), dan perambahan).

Di sisi lain, praktek-praktek kehutanan masyarakat yang telah mampu membuktikan keberhasilan rehabilitasi lahan dan kelestarian pengelolaan hutan merupakan potensi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pengurangan illegal logging dan penurunan emisi karbon. Secara nasional, kehutanan masyarakat di Indonesia diperkirakan memiliki potensi luasan sekitar 9 juta hektar; meliputi alokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebesar 5,4 juta hektar, Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebesar 2,1 juta hektar, dan Hutan Rakyat sebesar 1,5 juta hektar. Potensi ini masih akan bertambah dengan pengembangan Hutan Desa, pola Kemitraan, dan Hutan Adat. Oleh sebab itu, sudah selayaknya berbagai varian kehutanan masyarakat didorong untuk menjadi salah satu bentuk pengelolaan hutan yang lestari dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

### **C. GOAL**

Terwujudnya kehutanan masyarakat yang lestari dan berkeadilan di Jawa dan Bali sebagai salah satu bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

### **D. PURPOSE**

Mendorong Berbagai Varian Kehutanan Masyarakat di Jawa dan Bali Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan Yang Baik dan Lestari Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

### **E. OUTPUTS**

---

<sup>1</sup> Menurut Sir Nicholas Stern dalam Bukunya Stern Review, The Economic of Climate Change, disebutkan dua kelompok besar penyebab gas rumah kaca, yaitu:

- a. Emisi energi: energi (24%), transportasi (14%), industri (14%), bangunan (8%), and energi lain (5%)
- b. Emisi non-energi: sampah (3%), pertanian (14%), penggunaan lahan (18%)

- 1) Tersiapkannya berbagai varian kehutanan masyarakat sebagai demonstrative activities dalam perdagangan jasa lingkungan (karbon, air, dsb) sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- 2) Terjaminnya kepastian tenurial dan kepastian pemanfaatan hasil dalam berbagai inisiatif kehutanan masyarakat
- 3) Tersiapkannya praktik-praktik kehutanan masyarakat dan pengelolaan hutan lainnya dalam perdagangan produk kehutanan yang legal
- 4) Menguatnya inisiatif pemulihan kawasan terdegradasi
- 5) Tersedianya dukungan permodalan dan akses pasar dalam pengembangan kehutanan masyarakat
- 6) Meningkatnya kapasitas parapihak dalam upaya pengembangan kehutanan masyarakat.
- 7) Tersedianya model penanggulangan kemiskinan di sektor kehutanan yang efektif
- 8) Terdokumentasi dan terpromosikannya berbagai inisiatif CBFM dalam rangka peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan informasi dan pengetahuan.

## **F. INDICATORS**

- 1) Adanya kesiapan berbagai varian kehutanan masyarakat sebagai demonstrative activities dalam skema perdagangan karbon;
- 2) Adanya kepastian tenurial dan pemanfaatan hasil dalam berbagai inisiatif kehutanan masyarakat;
- 3) Adanya kesiapan kelembagaan dan mekanisme dalam pengelolaan kehutanan masyarakat;
- 4) Adanya kelembagaan dan mekanisme dalam upaya kepastian legalitas produk-produk kehutanan, khususnya kayu;
- 5) Adanya upaya-upaya pemulihan kawasan terdegradasi pada beberapa lokasi di Jawa dan Bali
- 6) Adanya dukungan permodalan dan akses pasar dalam pengembangan kehutanan masyarakat;
- 7) Adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya pengembangan kehutanan masyarakat;
- 8) Adanya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan yang disusun secara partisipatif dan pro-poor budget
- 9) Adanya pengelolaan informasi dan pengetahuan sebagai upaya promosi inisiatif kehutanan masyarakat

## **G. PROGRAM IMPLEMENTATION STRATEGIES**

### **1. PENGEMBANGAN JARINGAN DENGAN MITRA STRATEGIS**

Sejak mulai didirikan pada Tahun 2005 sampai dengan saat ini, JAVLEC melakukan strategi implementasi program melalui pengembangan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak. Hal ini sebenarnya hanyalah melanjutkan kolaborasi yang telah terbangun sejak tahun 1999. Mitra strategis yang dimaksud disini adalah parapihak yang meliputi Pemerintah (Pusat dan Daerah), NGO, Organisasi Rakyat, Bussiness Supporting Organization (BSO), Kelompok Kerja (Working Group), Perguruan Tinggi dan berbagai pihak lainnya. Pengembangan jaringan dengan mitra strategis ini akan terus dilakukan untuk peningkatan efektivitas dan cakupan skala program.

### **2. LAYANAN HIBAH**

Salah satu peran strategis yang dilakukan JAVLEC sebagai sebuah Community Foundation adalah layanan hibah programatik kepada mitra strategis. Dalam pelaksanaannya, penentuan jumlah, program serta mitra dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Proses ini dilakukan melalui call for project definition secara terbuka bagi parapihak di Jawa dan Bali yang penentuan program yang akan difasilitasi diputuskan oleh komite yang terdiri dari perwakilan CF, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, NGO dan Masyarakat Sipil yang didasarkan pada criteria seleksi yang disusun bersama yang tentu saja harus sesuai dengan subtansi program yang akan didorong.

### **3. KOORDINASI PERIODIK**

Koordinasi periodik ini dilakukan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program serta identifikasi berbagai support yang diperlukan dalam pelaksanaan program di lapangan. Selama ini melalui koordinasi periodik mampu menjamin keberhasilan pelaksanaan program dan mampu mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan serta berhasil mengidentifikasi beberapa bentuk support yang diperlukan seperti asistensi teknis dan peningkatan kapasitas.

### **4. DOKUMENTASI DAN DISSEMINASI HASIL PEMBELAJARAN**

Aktivitas ini ditujukan untuk peningkatan akses data, informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan program-program pembangunan bagi parapihak, baik publik, masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor privat. Terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan masih ada sampai saat ini dalam hubungannya dengan akses data, informasi dan pengetahuan. Pertama, kurangnya akses informasi dan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung diantara parapihak. Kedua, masih relatif rendahnya kapasitas dalam upaya-upaya fasilitasi informasi dan komunikasi. Ketiga, masih kurangnya basis data, informasi dan pengetahuan yang dapat diakses dengan mudah. Dan keempat, masih rendahnya kerja-kerja kolaborasi antarpihak dalam penyebaran data, informasi dan pengetahuan

### **5. MONITORING DAN EVALUASI**

Strategi ini dimaksudkan untuk mengetahui deskripsi status pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode waktu 6 bulan. Selain itu, strategi ini juga diarahkan untuk melakukan evaluasi bersama pelaksanaan program yang mencakup capaian, hambatan, kendala, peluang dan berbagai dinamika yang ada dan merumuskan langkah strategis dan tindak lanjut untuk peningkatan efektifitas dan pengembangan program.

#### **6. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM**

Strategi ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program. Beberapa langkah strategis yang dipilih adalah:

- a. Penyampaian Quarterly Financial Report dari Pengurus Harian kepada Dewan Komunitas
- b. Review bersama pengelolaan program secara periodic (minimum 6 bulan sekali)
- c. Melakukan audit keuangan dan kelembagaan tahunan yang dilakukan oleh auditor publik

### **H. PROGRAM IMPLEMENTATION AREAS AND PERIOD**

Program ini akan dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali dalam periode 3 tahun mulai Oktober 2008 sampai dengan Oktober 2011

### **I. BENEFICIARIES**

- 1) Departemen Kehutanan;
- 2) Pemerintah Daerah Propinsi: Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali;
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten: Malang, Mojokerto dan Madiun (Jawa Timur); Gunungkidul dan Kulonprogo (DI Yogyakarta), Bogor, Sukabumi, Buleleng
- 4) Pemerintah Desa;
- 5) Working group
- 6) Perguruan Tinggi
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat
- 8) BSO - Business Supporting Organization
- 9) Masyarakat

### **J. INDICATIVE WORKPLAN**

Terlampir

**K.RENCANA STRATEGIS LEMBAGA**

Klaster	Fokus	Program Strategis
1. Tata Pengurusan Sumberdaya Hutan yang Baik	1.1 Peningkatan dan Pemantapan Advokasi Kebijakan Pengelolaan SDH	1.1.1 Fasilitasi proses kaji ulang kebijakan sebagai pendukung perumusan dan penyusunan kebijakan dalam rangka perbaikan pengelolaan SDH
		1.1.2 Fasilitasi agenda untuk mendorong proses demokratisasi dan perbaikan kebijakan pengelolaan SDH
		1.1.3 Fasilitasi pengembangan strategi advokasi yang efektif
	1.2 Peningkatan Serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan para pihak	1.2.1 Fasilitasi pembentukan dan penguatan jaringan, kelompok kerja dan aliansi strategis lainnya dalam advokasi kebijakan pengelolaan SDH
		1.2.2 Fasilitasi peningkatan kapasitas personal dan kelembagaan dalam advokasi kebijakan pengelolaan SDH dan pewujudan tata pengurusan kehutanan yang baik
		1.2.3 Fasilitasi proses reformasi birokrasi dalam pengelolaan SDH
	1.3 Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Upaya-upaya Pencapaian Solusi, Resolusi Konflik dan Pengawasan	1.3.1 Fasilitasi proses-proses perencanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
		1.3.2 Fasilitasi proses-proses dialog multipihak dalam pengelolaan SDH
		1.3.3 Fasilitasi pengembangan strategi resolusi konflik pengelolaan SDH

Klaster	Fokus	Program Strategis
1. Peningkatan Daya Dukung Sistem Penyangga Kehidupan	2.1 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Pengelolaan SDH Berkelanjutan	2.1.1 Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kolaborasi parapihak dalam pengelolaan SDH berkelanjutan dan peningkatan dayadukung sistem penyangga kehidupan 2.1.2 Fasilitasi pembentukan dan penguatan jaringan, kelompok masyarakat, kelompok kerja dan aliansi strategis lainnya dalam pengelolaan SDH berkelanjutan dan peningkatan daya dukung sistem penyangga kehidupan 2.1.3 Fasilitasi penyiapan dan perumusan kebijakan, kesepahaman dan perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan SDH berkelanjutan dan peningkatan daya dukung sistem penyangga kehidupan
	2.2 Pembangunan Lokasi Pembelajaran	2.2.1 Fasilitasi proses pembangunan lokasi pembelajaran yang terpadu 2.2.2 Fasilitasi kajian-kajian untuk mendukung skema pengelolaan SDH berkelanjutan dan peningkatan daya dukung sistem penyangga kehidupan
1. Jaminan Hak Akses Masyarakat dalam Pengelolaan SDH	3.1 Reformasi Hak Akses Pengelolaan SDH	3.1.1 Fasilitasi proses perbaikan kebijakan dalam penguatan hak akses masyarakat dalam pengelola SDH 3.1.2 Fasilitasi program kolaborasi dan kolaborasi program dalam PHLBM
	3.2 Pengembangan Lokasi Pembelajaran	3.2.1 Fasilitasi proses pembangunan lokasi pembelajaran pengelolaan SDH lestari berbasis masyarakat yang terpadu 3.2.2 Fasilitasi peningkatan kapasitas dalam pengelolaan SDH lestari berbasis masyarakat 3.2.3 Fasilitasi kajian-kajian untuk mendukung skema pengelolaan SDH berbasis masyarakat
1. Penanggulan gan Kemiskinan	4.1 Peningkatan Efektivitas Strategi Penanggulangan Kemiskinan	4.1.1 Fasilitasi proses perumusan strategi penanggulangan kemiskinan 4.1.2 Fasilitasi pengembangan pendekatan-pendekatan penanggulangan kemiskinan
	4.2 Sistem Penganggaran Daerah yang Berpihak pada Masyarakat Miskin	4.2.2 Fasilitasi proses perencanaan program aksi penanggulangan kemiskinan 4.2.3 Fasilitasi proses penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin
	4.3 Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	4.3.1 Fasilitasi proses pembangunan basis data kemiskinan
		4.3.2 Fasilitasi proses monitoring dan evaluasi yang partisipatif dalam program penanggulangan kemiskinan

Klaster	Fokus	Program Strategis
1. Peningkatan Akses Thd Sumber Pendanaan, Informasi dan Pasar	5.1 Fasilitas pendanaan bagi usaha ekonomi masyarakat	5.1.1 Fasilitas pendanaan bagi usaha ekonomi masyarakat
		5.1.2 Fasilitas distribusi informasi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat
		5.1.3 Fasilitas proses-proses intermediasi bisnis produk usaha ekonomi masyarakat
		5.1.4 Fasilitas pengembangan basis data produk dan informasi pasar
	5.2 Peningkatan Kapasitas	5.2.1 Fasilitas peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan CBO dan BSO dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja usaha ekonomi masyarakat
		5.2.2 Fasilitas peningkatan kapasitas dalam penguasaan teknologi dan ketrampilan
	5.3 Peningkatan Produktifitas Usaha Masyarakat	5.3.1 Fasilitas pengembangan usaha mikro
		5.3.2 Fasilitas berbagai upaya peningkatan produktifitas usaha ekonomi masyarakat
	1. Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi, Pengetahuan dan Hasil Pembelajaran	6.1 Akselerasi Proses Komunikasi antar pihak
6.1.2 Fasilitas pengembangan media informasi dan komunikasi sebagai sarana advokasi, disseminasi, promosi dan kampanye		
6.2 Peningkatan Kapasitas		6.2.1 Fasilitas pelatihan strategi komunikasi
		6.2.2 Fasilitas proses pembelajaran dalam strategi komunikasi
		6.2.3 Fasilitas pengembangan metode pembelajaran yang efektif
6.3 Basis Data, Informasi dan Pengetahuan		6.3.1 Fasilitas dokumentasi pengetahuan dan paraktek-praktek terbaik dalam PHLBM
		6.3.2 Pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan berdasar pada kondisi aktual yang mutakhir
		6.3.3 Pengembangan basis data, informasi dan pengetahuan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan ketersediaan
6.4 Peningkatan kolaborasi parapihak dalam penyebaran data, informasi dan pengetahuan		6.4.1 Fasilitas penguatan dan pembentukan jaringan fasilitas informasi dan komunikasi dalam PHLBM
		6.4.2 Fasilitas program kolaborasi dalam penyebaran, promosi dan kampanye inisiatif PHLBM

Klaster	Fokus	Program Strategis
1. Peningkatan Kapasitas CF	7.1 Peningkatan Kapasitas dalam Penguasaan Isu PHLBM dan Tata Kelola Kehutanan yang Baik	7.1.1 Training dan Pembelajaran Tematik
	7.2 Peningkatan Kapasitas dalam Fasilitasi Program	7.2.1 Training Fasilitator
		7.2.2 Training dan Asistesnsi Teknis Pengembangan Program
	7.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Mobilisasi Sumberdaya	7.3.1 Penguatan Jaringan dengan Lembaga Pendanaan
		7.3.2 Peningkatan Kapasitas dalam Manajemen Internal

## ORGANISASI PENGUSUL

### A. INFORMASI UMUM ORGANISASI

Nama Organisasi : Java Learning Center  
 Singkatan Organisasi : JAVLEC  
 Tanggal Didirikan : 23 Juni 2005  
 Akta Notaris : 05/23 Juni/2005, Notaris Suastutiningsih A. Wijayanto, SH  
 Alamat Kantor : JAVLEC, Plemburan RT 5 RW 25 No 41. Gang Timor-Timur, Jl. Kaliurang Km 6,5, Sleman, Yogyakarta  
 Telp : +62 274 - 7100722  
 Website : [www.infojawa.org](http://www.infojawa.org), [www.javlec.org](http://www.javlec.org)  
 Email : [kp-phj@jmn.net.id](mailto:kp-phj@jmn.net.id), [javlec@javlec.org](mailto:javlec@javlec.org)  
 NPWP :

### B. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA

#### 1. DEWAN KOMUNITAS

Ketua : San Afri Awang  
 Anggota : I Made Subadia Gelgel  
 Abdul Kholiq Arief  
 Rahmanta Setiahadi  
 Farid Gaban  
 Lili Charli Tahlan

Pardiastuti

## 2. PENGURUS HARIAN

Direktur Eksekutif : Agus Affianto  
 General Administrator : Fachrudin Rijadi  
 Grant Administrator : Aprilianti Dwi Rahayu  
 Program Finance : Desty Roosdiana  
 Cashier : Miftahudin Fuad  
 Program Manager Pdf : Rohni Sanyoto  
 PO Riset Dan Advokasi : Eko Budi Wiyono  
 PO CB, Comdev dan SL : Rahman Rosyidi  
 Program Manager Infojawa : Nurwachid Juni Adi  
 PO Database : Bayu Budi Aji  
 Staf Media Outreach : Hesti Maharini  
 Program Manager CEF : Hari Cahyono  
 PO Akses Pasar dan Modal : Purnomo Aji  
 Investment Manager : Fifin Kusumaning Ayu

## C. INFORMASI BANK

Bank : Bank Mandiri KK MM UGM  
 Nomor Rekening : 137-00-0555298-5  
 Nama Rekening : JAVA LEARNING CENTER  
 SWIFT Code : BEIIDJA

## D. PROGRAM KERJASAMA

### 1. DFID

Program : Multi-stakeholder Forestry Program  
 Tahun : 2005-2006  
 Status Program : Selesai Dilaksanakan dan telah diaudit oleh akuntan public  
 Total Dana : IDR 4.228.512.307

### 2. DFID (EXTENTION)

Program : Multi-stakeholder Forestry Program  
 Tahun : 2006-2007  
 Status Program : Selesai Dilaksanakan dan telah diaudit oleh akuntan public  
 Total Dana : US \$ 80.000

### 3. FORD FOUNDATION

Program : Establishing JAVLEC as Supporting Institution on CBFM Development  
 Tahun : 2006-2007  
 Status Program : Selesai Dilaksanakan dan sedang dalam proses audit oleh akuntan public  
 Total Dana : US \$ 100.000

### 4. PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA

Program : Forestry Governance Program  
 Tahun : 2007-2009

Status Program : On-Going  
Total Dana : US \$ 400.000